

**TESIS**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN,  
PENDIDIKAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI  
SELATAN**

Disusun Oleh :

**DIRMANSYAH DARWIN**

**A052211007**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER  
DAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN,  
PENDIDIKAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun oleh

**DIRMANSYAH DARWIN**

**A052211007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Sumber Daya** Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal Selasa 24 Januari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Madris, DPS., SE., M.Si.  
NIP. 19601231 198811 1 002

Dr. Fatmawati, SE., M.Si.  
NIP. 19640106 198803 2 001

Ketua Program Studi Magister  
Ekonomi Sumber Daya

Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si  
NIP. 19770913 200212 2 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP. 19640205 198810 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIRMANSYAH DARWIN**

NIM : **A052211007**

Program Studi : **Magister Ekonomi Sumber Daya**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: **Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Januari 2023  
Yang menyatakan,



**Dirmansyah Darwin**

## ABSTRAK

DIRMANSYAH DARWIN. *Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.* (Dibimbing oleh Madris dan Fatmawati)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan, belanja pemerintah bidang pendidikan dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel pada setiap kabupaten/kota antara tahun 2011-2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kedua variabel belanja pemerintah bidang Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ketiga, variabel belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil temuan tersebut merupakan bentuk fenomena dalam meningkatkan modal manusia. Direkomendasikan perlu kiranya meninjau sistem pengeluaran pemerintah agar dapat lebih tepat sasaran dalam memaksimalkan pengeluaran demi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia masyarakat.

**Kata Kunci:** *Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Belanja Modal, Pengeluaran Pemerintah*



## ABSTRACT

DIRMANSYAH DARWIN. *The Effect of Government Spending in Health, Education, and Capital Expenditures on Human Development Index in South Sulawesi Province* (supervised by Madris and Fatmawati)

This study aims to analyze the effect of government spending on health, government spending on education and capital spending on the Human Development Index through economic growth in South Sulawesi Province. The data used in this research is secondary data. The analytical method used is a multiple linear regression analysis method using panel data for each district/city between 2011-2020. The research findings show that the variable government spending on Health has a positive influence on the Human Development Index, the second variable on government spending on Education has a positive effect on the Human Development Index, third, the capital expenditure variable has a positive effect on the Human Development Index. The results of the findings presented are a form of phenomenon where in increasing human capital, it is necessary to review the system of government spending so that it can be more targeted in maximizing spending in order to improve the quality of human resources in society.

Keywords: Human Development Index, Economic Growth, Health, Education, Capital Expenditures, Government Expenditures



Scanned with CamScanner

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas nafas kehidupannya dan Nabi Muhammad SAW atas Risalahnya karena dengan rahmat dan hidayahnyalah sehingga kendala teknis maupun non teknis dalam penyelesaian tesis ini dapat terlewati dan akhirnya selesai sesuai dengan harapan.

Tesis ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir Magister pada Program Study Ekonomi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Judul tesis yang penulis susun adalah **“Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati

penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak.

Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universi dan para Pembantu Rektor serta seluruh jajaran yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr. Dwi Retno Fitrianti, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Magister Ekonomi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

4. Bapak Dr. Madris DPS, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Untuk Penguji Komprehensif Bapak Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si, Bapak Dr. Amiruddin K., M.EI, M.Ag, Bapak Hasbiullah, S.E., M.Si, yang telah mengajarkan saya bahwa seseorang itu belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai tetapi untuk memahaminya pula.
6. Untuk penguji Proposal, ujian Hasil dan Ujian Akhir Tesis Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA Bapak Dr. Paulus Uppun, S.E., M.Si dan Bapak Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si S.E., M.Si
7. Seluruh Dosen, Staf akademik, Staf Jurusan Ilmu Ekonomi, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
8. BPS Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Supir Angkutan Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Kedua Orang tuaku tercinta ayahanda Darwin Amin dan Ibundaku yang tercinta Dra. Helmi Suarni Muluk yang selalu memberikan doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan tesis ini
10. Untuk Kedua adikku yang tercinta Didin Ilhamsyah Darwin dan Deddy Alamsyah Darwin
11. Untuk sahabat terbaikku di Prodi Magister Ekonomi Sumber Daya dan kawan-kawan pejuang tesis sejagad pasca ekonomi Universitas Hasanuddin yang terus memompa semangat untuk terus berjuang bersama.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan

memberikan berkahNya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis, Makassar 1 Januari 2023

**Dirmansyah Darwin**

NIM. A052211007



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori & Konsep.....	12
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	12
2.1.2 Teori Wagner.....	12
2.1.3 Teori Peacock & Wiseman.....	14
2.1.4 Konsep Belanja Daerah.....	18
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.6 Jenis Belanja Daerah.....	25
2.1.7 Belanja Kesehatan.....	27
2.1.8 Belanja Pendidikan.....	28
2.1.9 Produk Domestik Regional Bruto.....	30
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	34

2.2.1 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	34
2.2.2 Hubungan Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	35
2.2.3 Hubungan Infrastruktur Terhadap (IPM).....	37
2.2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	38
2.3 Penelitian Empirik.....	39
<b>BAB III KERANGKA PIKIR &amp; HIPOTESIS.....</b>	<b>42</b>
3.1 Kerangka Pikir.....	43
3.2 Hipotesis.....	44
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Pendekatan Penelitian.....	45
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
4.4 Teknik Analisis Data.....	46
4.5 Definisi Operasional Variabel.....	51
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
5.1 Deskripsi Variabel Penelitian.....	52
5.2 Hasil Penelitian.....	61
5.3 Pembahasan.....	67
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 5.2 Laju pertumbuhan produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 5.3 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 5.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2017.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 5.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2017.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 5.6 Belanja Modal/Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 5.7 Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 5.8 Estimasi Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 5.1 Bagan Hasil Penelitian.....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Paradigma pembangunan manusia disederhanakan dalam bentuk indeks sebagai indikator pembangunan manusia di seluruh negara yang dibuat oleh *United Nations Development Programme*. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia memperoleh nilai sebesar 71.92 sehingga Indonesia memperoleh label negara dengan indeks pembangunan manusia tingkat atas. Perolehan ini menjadikan suatu prestasi pembangunan manusia di Indonesia berhasil mencapai tingkat atas. Pencapaian angka tersebut tidak sama dengan kondisi pembangunan manusia pada tingkat provinsi hingga tahun 2019.

Pengembangan modal manusia adalah pengembangan total pribadi manusia karena semua sumber daya lainnya bergantung pada modal manusia untuk efektivitas dan produktivitasnya. Alasan dan manfaat berlimpah untuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Inilah alasan mengapa negara dan organisasi membuat anggaran mereka untuk pengembangan sumber daya manusia (Nkogbu, 2015).

Dampak positif dari peningkatan kualitas Kesehatan dan pendidikan yang dapat ditimbulkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan dampak positif dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memajukan perekonomian. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu perhubungan pengembangan

paling topical (Kafayat Amusa. 2019). Sector Kesehatan dan Pendidikan telah dimaksud dalam indikator *Human Capital* merupakan hal yang penting dalam menjadi tinjauan setiap masyarakat dan pemerintah.

Tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif (UNDP 2003). Keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia. UNDP telah menetapkan sebuah tolak ukur yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Salah satu cara untuk melihat bagaimana peranan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu meningkatkan kualitas

manusia melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan pendidikan dan sarana prasarana. Pemerintah yang berperan sebagai penentu kebijakan publik yang termasuk pada tata Kelola pembelanjaan negara dalam mensejahterakan masyarakat pada hakikatnya perlu memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut sebagai modal dalam pembangunan manusia.

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Sunarni (2017) merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan. indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan. sedangkan indikator daya beli mengukur standar hidup (BPS, 2017).

Peningkatan indeks pembangunan manusia dalam suatu daerah atau negara dapat kita lihat dari meningkatnya mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut. Dalam mengukur tingkat kualitas penduduk yang ada dalam satu wilayah, kita dapat melihat tingkat perubahan terhadap penyerapan jumlah tenaga kerjanya, dalam peningkatan mutu tenaga kerja sendiri dapat kita ukur melalui tingkat skill yang dimiliki tenaga kerja

tersebut, peningkatan skill tenaga kerja dapat kita lihat dari indikator yang mempengaruhi skill tenaga kerjanya melalui tingkat Pendidikan yang ia peroleh.

Dalam suatu wilayah, pengaruh infrastruktur layanan social terkait pada bidang Kesehatan dan pendidikan dapat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi, hal ini di tunjukkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan . Menurut (More & Aye. 2017) yang menemukan bahwa di Afrika Selatan pendidikan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dan efek negatif pada ketidaksetaraan seperti yang diharapkan. Sementara pengaruhnya terhadap pertumbuhan signifikan, pengaruhnya terhadap ketimpangan tidak signifikan. Sehubungan dengan pengeluaran Kesehatan, menemukan pengaruhnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan sedangkan pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, perlu dicatat bahwa alokasi belanja tidak menjamin penggunaan belanja yang efisien. Lebih jauh lagi, membangun lebih banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan mungkin tidak menghasilkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Faktor-faktor seperti kurangnya implementasi dan korupsi tidak boleh diabaikan. Misalnya belanja pendidikan yang berpihak pada sekolah-sekolah di mana anak-anak elit, ras atau gender tertentu pasti akan membiarkan ketimpangan tidak tertangani jika tidak diperparah.

Pada kasus yang merujuk pada wilayah Afrika Selatan kita dapat melihat bahwa pada studi tersebut terdapat ketidakmerataan factor infrastruktur Kesehatan dan infrastruktur Pendidikan yang didapatkan oleh setiap wilayah, dapat kita ketahui bahwa pada Indonesia juga harus meninjau Kembali pemerataan layanan infrastruktur yang diberikan pada masing-masing wilayah.



Dalam peningkatan indeks pembangunan manusia dapat kita perhatikan dari sisi variable pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan adalah suatu bentuk pengembangan *Human Resource* yang bermanfaat dalam mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing tenaga kerja dalam hubungannya dengan hidup bermasyarakat. Pendidikan sangat penting dalam menentukan masa depan masyarakat yang lebih baik dan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia karena dimensinya sangat luas, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi dari pembangunan manusia melalui tiga indikator utama yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Arfiyansyah, 2018)). Secara teknis, IPM memberikan suatu ukuran gabungan pada tiga dimensi, yaitu: (i) umur panjang dan hidup sehat (*life expectancy at birth*); (ii) pengetahuan (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (*mean years schooling*); serta (iii) standar hidup layak (*purchasing power parity*) (Mahulauw, 2016).

Dalam upaya meningkatkan (IPM) APBD mencakup beberapa sumber pendapatan daerah serta berbagai pengeluaran pemerintah daerah termasuk belanja sektor Pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lainnya. yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Investasi pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia. orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih kepada manusia sebagai elemen dasar.

Belanja pemerintah pada bidang kesehatan berkaitan dengan besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan dalam membiayai pemenuhan di sektor kesehatan. Anggaran kesehatan dinyatakan dalam hitungan miliar rupiah pertahun. Dimana semakin besar anggaran pemerintah di bidang kesehatan maka dapat berpengaruh secara langsung terhadap indeks pengembangan sumber daya manusia.

Kemudian pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan. juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pengembangan manusia, hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah pada bidang Pendidikan, merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat kurang mampu. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan sumber kualitas sumber daya manusia melalui bidang kesehatan dan pendidikan.

Pengeluaran publik yang efektif untuk pendidikan dan perawatan Kesehatan sangat penting karena sumber daya terbatas dan ekonomi pertumbuhan diperlukan untuk menopang pembangunan ekonomi. dan dengan demikian meningkatkan standar hidup dan perkembangan manusia (Roland and Craigwell, 2012). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perhitungan pertumbuhan ekonomi tetapi pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Tetapi pengeluaran pemerintah juga

menjadi hal yang krusial karena mempunyai efek sosial politis yang strategis sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi (Madris, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Sulawesi Selatan. sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dimana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya dalam lima sampai sepuluh tahun terakhir, pada sektor Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dari rangkaian temuan penelitian yang telah di urai terkait permasalahan atau faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang terdapat di beberapa daerah yang ada di Indonesia kita akan melihat indeks pembangunan manusia yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai pada tahun 2020, persentase indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebesar 68.49 dan 2015 sebesar 69.15 lalu kembali meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 69.76 dan kemudian terus mengalami peningkatan sampai angka terbesar yaitu. 71.93 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kualitas dan tingkat kesejahteraan SDM di Sulawesi Selatan semakin membaik, namun perlu adanya kita menganalisis bagaimana pembangunan manusia tersebut dapat membaik dan meninjau factor vital yang mempengaruhinya

Dengan melihat fenomena pada rangkaian literatur dan data indeks pembangunan manusia dan faktor penyebabnya, maka penulis tertarik mengambil judul penelitaian “Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan,

Pendidikan, dan Belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan kita bahas sebagai berikut :

1. Apakah Belanja pemerintah di bidang Kesehatan berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020
2. Apakah Belanja pemerintah di bidang Pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020
3. Apakah Belanja modal berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Apakah Belanja pemerintah di bidang Kesehatan berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020
2. Apakah Belanja pemerintah di bidang Pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tidak langsung

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020

3. Apakah Belanja modal berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Sebagai bahan referensi dan acuan bagi pihak yang akan mendalami masalah belanja pemerintah di bidang kesehatan. di bidang Pendidikan, belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui belanja di bidang Kesehatan, di bidang Pendidikan, belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, baik dari kalangan praktisi dan akademisi, dengan permasalahan yang penulis teliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). (BPS. 2010)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur

pembangunan yang sangat penting. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Untuk mendukung aspek pendidikan dan kesehatan dibutuhkan anggaran. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Selain dari sisi anggaran faktor lain yang dianggap penting dalam peningkatan IPM adalah dari segi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu aspek lain yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu prioritas pembangunan suatu negara, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan.

Sejak tahun 1990. *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan laporan tahunan berupa *Human Development Report* (HDR). Dalam HDR tersebut dikeluarkan laporan tahunan mengenai indek pembangunan manusia/*Human Development Inde* (HDI) di tiap negara. Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih Hadiah Nobel berkebangsaan India yaitu Amartya Sen. dan seorang ekonom dari Pakistan. Mahbub Ul Haq. yang dibantu oleh *Gustav Ranis dari Yale University dan Lord*

*Meghnad Desai dari London School of Economic, Sen* menyatakan bahwa HDI adalah sebuah pengukuran indeks manusia yang cukup kasar (*vulgar measure*) karena masih banyak keterbatasan.

Namun. HDI menerapkan ukuran pada aspek-aspek pengembangan kualitas manusia secara lebih komprehensif daripada hanya sekedar pendapatan perkapita seperti yang dilakukan selama ini dalam menentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu negara maju, berkembang, atau belum berkembang. HDI juga merupakan salah satu bahan kajian atau topik pembahasan bagi para peneliti untuk meneliti ukuran-ukuran kualitas manusia di sebuah negara secara luas dan beragam.

Dalam *Human Development Report* (UNES-CO. 2007) dijelaskan bahwa *Human Development Inde* (HDI) merupakan suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to human development*. HDI melakukan pengukuran rata-rata capaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah: Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur. sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life epectancy at birth*); Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya. sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga. serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar. menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan.



Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak. sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator purchasing power parity (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika. Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam Indeks pembangunan manusia tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi. yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam Indeks pembangunan manusia lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan.

Sunarni (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli.

Risha Amalia (2016) menyatakan dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*aprocess of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

### 2.1.2 Teori Wagner

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB.

Wagner (dalam Agustina, 2014) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, Pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Agustina (2014) menyatakan teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product*. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat. secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat. terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

### 2.1.3 Teori *Peacock* dan Wiseman

*Peacock* dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik, *Peacock* dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar

pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

*Peacock* dan *Wiseman* mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak. yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut *Peacock* dan *Wiseman* adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal. kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu. katakanlah karena perang atau eksternalitas lain. maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Bau (2011) mengatakan *Peacock* dan *Wiseman* adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang

terbaik. Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Bau, 2011).

#### **2.1.4 Konsep Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar. yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah yang dialokasikan secara adil dan merata untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya. pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian

pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggungjawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah menurut Mahmudi (2010) didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di rekening Kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas.

Menurut Halim (2014). "Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset. atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana". Menurut Halim (2014) "Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran".

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, Zebua (2014) belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2016) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010). belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berdasarkan 1) Klasifikasi Ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai. belanja barang. belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan tak terduga. 2) Klasifikasi menurut Organisasi Publik. Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.3) Klasifikasi Fungsi. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mahsun (2011) menyatakan bahwa belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

### **2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi apabila kegiatan ekonomi negara tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain, pertumbuhannya terjadi jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian di suatu negara bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. (Rahardjo Adisasmita, 2013). Schumpter dalam Boediono (2012) juga menyatakan bahwa pertumbuhan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara rasional. Menurut teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dua faktor yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk, Arsyad (1999).



### **2.1.6 Jenis-Jenis Belanja Daerah**

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua. belanja dapat dikelompokkan menjadi :

#### **1) Belanja Langsung**

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: a) Belanja pegawai. b) Belanja barang dan jasa. c) Belanja modal.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dijelaskan satu persatu dapat dilihat melalui penjelasan bahwa : a) Belanja pegawai. Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. b) Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c) Belanja modal Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemeritahan. seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. dan asset tetap lainnya, Belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas), Mahmudi (2016).

## 2) Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a) Belanja pegawai, b) Belanja bunga, c) Belanja subsidi, d) Belanja hibah, e) Belanja bantuan social, f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dijelaskan satu persatu melalui penjelasan bahwa : a) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi. dalam bentuk gaji dan tunjangan. serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. b) Belanja Bunga. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, c) Belanja Subsidi, Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, d) Belanja Hibah, Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. e) Bantuan Sosial, bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. f) Belanja Bagi Hasil, belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

1) Belanja Administrasi Umum, Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Dimana belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis. yaitu: a) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. b) Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan public. c) Belanja Perjalanan Dinas. merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan public, d) Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan

barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

## 2) Belanja Operasi. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. yang meliputi: a) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. b) Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan public. c) Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan public. d) Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan public. e) Belanja Modal, Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan, Belanja modal dibagi menjadi: 1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya. pembelian alat transportasi massa. dan pembelian mobil ambulans. 2) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas. pembangunan gedung

pemerintahan. dan pembangunan rumah dinas. 3) Belanja Transfer. Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan meupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik. 2010).

Jenis-Jenis belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi :

1. Belanja Operasi, Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin. c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Aset Lainnya.

### 3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

### 4. Belanja Transfer.

Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

## **2.1.7 Belanja Kesehatan**

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Qanun Aceh No. 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun nomor 2 tahun

2008 tentang tata cara pengalokasian TDHB migas dan penggunaan dana otonomi khusus. Dalam Qanun disebutkan bahwa 60 persen dana dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh. 40 persen dialokasikan untuk program kegiatan kabupaten/kota dengan catatan 20 persen untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan. 10 persen pembangunan rumah layak huni kepada penduduk miskin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 170 dan pasal 171. Pasal 170 : (1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi. teralokasi secara adil. dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. (2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan. alokasi. dan pemanfaatan. (3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah. pemerintah daerah. masyarakat. swasta dan sumber lain.

### **Pasal 171**

1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi. kabupaten/ kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. 3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menyikapi pasal 170 dan 171 pada undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009. maka pemerintah pusat wajib untuk mengalokasikan 5% APBN untuk pembiayaan kesehatan begitu pula pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk menyediakan 10% APBD untuk pembiayaan kesehatan.

Dengan demikian maka pemerintah pusat dan daerah minimal harus mengalokasikan anggaran 30% untuk pendidikan dan kesehatan. jika hal ini dapat terpenuhi maka harus diimbangi dengan peningkatan status pendidikan dan kesehatan yang optimal.

Belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah termasuk ke dalam alokasi belanja pembangunan. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk pembiayaan proses perubahan dan bersifat menambah modal masyarakat baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Kriteria belanja sektor kesehatan secara umum dapat dibagi ke dalam lima aspek. yaitu : a) pelayanan kesehatan dan jasa-jasa sanitasi lingkungan, b) rumah sakit. institusi kesejahteraan social, c) Pendidikan, pelatihan, penelitian medis murni, d) pekerjaan medis social, kerja social, e) praktisi medis dan penyedia pelayanan kesehatan tradisional. Sektor-sektor tersebut yang kemudian akan mendapat alokasi belanja kesehatan dari pemerintah.

### **2.1.8 Belanja Pendidikan**



Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan ke miskin. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran.

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut

digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga untuk penghitungan indeks pendidikan. dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf. adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis. dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

#### **2.1.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang. penekanannya ialah pada aspek yaitu proses. output per kapita. serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses. bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah. menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS. 2018).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal. 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno. 2000). Sedangkan menurut BPS (2018) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

## **2.2. Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan di sektor kesehatan. Anggaran kesehatan dinyatakan dalam miliar rupiah pertahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Mahulauw. dkk (2016) mengatakan bahwa hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa besar pengaruh pengeluaran di bidang Kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pengeluaran pemerintah sebesar 0.291, dimana pengaruh yang diperoleh bernilai positif. Nilai ini signifikan pada tingkat kesalahan 0.05 dengan signifikansi sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM). Hasil ini memperkuat temuan dari Rajkumar & Swarop (2008). bahwa peningkatan 1 persen pengeluaran publik kesehatan per GDP menurunkan angka kematian dibawah 5 tahun sebesar 0.32 persen. Hal ini karena pengeluaran pemerintah telah efektif dalam membelanjakan beberapa alokasi bantuan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh Jha. Biswal & Bagala (2016) di India yang menemukan bahwa peran pengeluaran belanja kesehatan oleh pemerintah hampir dipastikan selalu berpengaruh terhadap kapasitas manusia yang lebih baik melalui saluran pengurangan kemiskinan.

Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya alokasi anggaran kesehatan di setiap kenaikan anggaran dalam aspek fasilitas dan infrastruktur kesehatan di pedesaan. Razmi (2012) juga mengemukakan bahwa peningkatan

kesehatan dapat meningkatkan produktivitas dan pasokan tenaga kerja. Produktivitas dan pasokan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesehatan yang lebih baik juga menunjang seseorang dapat mengakses tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Razmi (2012) peningkatan pengeluaran kesehatan terutama untuk promosi kesehatan (pencegahan dan pelayanan kesehatan) sangat penting dalam meningkatkan kualitas manusia

### **2.2.2 Hubungan Variabel Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan sumber kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Aimon, 2012).

Hasil tersebut mendukung temuan dari Edeme (2014), yang meneliti di 20 negara bagian Nigeria pada tahun 1999-2012, bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki efek signifikan pada pembangunan manusia. Efek pengeluaran bidang pendidikan ini menular kebidang kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan dan energi, perlindungan lingkungan, perumahan dan sumber daya air.

### **2.2.3 Hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Infrastruktur merupakan hal yang tidak dapat kita pisahkan dalam mengembangkan potensi Indeks Pembangunan Manusia, ketersediaan berbagai infrastruktur yang dapat memudahkan akses pengetahuan dan pembangunan pada masyarakat sangat penting. Berdasarkan konsep pembangunan,

terkandung makna-makna alokasi sumber-sumber daya, regulasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sebagai metode alokasi sumber-sumber daya (*resources*) yang dimiliki publik, seperti sumber daya alam, sumber daya energi, sumber dana dan sumber daya manusia. Dalam perspektif ini, pembangunan seyogyanya dapat memperluas akses publik untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses publik untuk memperoleh dan menikmati berbagai fasilitas pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, air bersih, listrik, keamanan, dan lain-lain), serta menjamin ketersediaan infrastruktur dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat. Abdul Maqin (2016).

#### **2.2.4 Hubungan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam suatu wilayah, pengaruh infrastruktur layanan social terkait pada bidang Kesehatan dan pendidikan dapat menjadi factor pertumbuhan ekonomi. hal ini di tunjukkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan, dalam (More & Aye, 2017) yang menemukan bahwa di Afrika Selatan pendidikan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dan efek negatif pada ketidaksetaraan seperti yang diharapkan. Sementara pengaruhnya terhadap pertumbuhan signifikan, pengaruhnya terhadap ketimpangan tidak signifikan. Sehubungan dengan pengeluaran kesehatan, menemukan pengaruhnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan sedangkan pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. perlu dicatat bahwa alokasi belanja tidak menjamin penggunaan belanja yang efisien. Lebih jauh lagi, membangun lebih banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan mungkin tidak menghasilkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Faktor-faktor seperti

kurangnya implementasi dan korupsi tidak boleh diabaikan. Misalnya belanja pendidikan yang berpihak pada sekolah-sekolah di mana anak-anak elit, ras atau gender tertentu pasti akan membiarkan ketimpangan tidak tertangani jika tidak diperparah.

#### **2.2.5 Hubungan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

PDRB perkapita biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah dan juga menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tergolong tinggi. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat untuk tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat setempat. Dengan meningkatnya produktivitas, maka penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tingginya PDRB akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan IPM.



karena daya beli merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro. 2006).

### **2.3 Penelitian Empirik**

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini. ada beberapa hasil temuan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. antara lain :

Abdul Kadir (2016) dalam penelitiannya yang mengaitkan pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi maluku dan pendapatan per kapita sebagai variabel intervening mendapatkan hasil *R Square* 68.1% terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa masing-masing variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Maluku.

Gilang Putra (2011) Pemerataan pembangunan manusia menjadi isu penting ketika terjadi ketimpangan antar daerah terutama provinsi hasil pemekaran. Provinsi hasil pemekaran tentunya memiliki peran dan kemampuan yang lebih untuk mengembangkan potensi manusia pada wilayahnya. Inilah yang mendasari pentingnya meneliti tentang pembangunan manusia pada provinsi hasil pemekaran. Indikator dari pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Infrastruktur menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia agar menghasilkan sumber daya manusia yang baik terutama sekolah. rumah sakit dan jalan. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan. kesehatan dan jalan tidak berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Implikasi dari penelitian ini adalah pemanfaatan yang efektif dan optimal dari infrastruktur yang ada dan perhatian akan kualitas darinya.

Laisina et al (2015) dalam penelitiannya dengan judul pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB melalui indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Peneliti berpendapat tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia karena selama periode penelitian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak mengalokasikan anggarannya dalam pembangunan sarana infrastruktur di bidang kesehatan.

Penelitian Habeahan (2015) dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM. Peneliti berpendapat tidak signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM karena belum optimalnya pelaksanaan program-program pendidikan seperti pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. program beasiswa

bagi siswa tidak mampu yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. terlebih lagi jumlah penduduk yang juga terus bertambah tiap tahunnya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan pendidikan dalam jumlah yang besar. Selain itu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dan siswa (hanya pembangunan sekolah secara fisik). Sedangkan Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM.

Hasan (2015) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal Terhadap Indeks. Hasil analisis menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Heka. (2017) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, secara simultan tidak berpengaruh